

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Esensi pembangunan adalah menciptakan kemandirian, termasuk dalam konteks pembangunan desa. Kemajuan daerah pedesaan merupakan salah satu tujuan utama pemerintah, yang dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keragaman dan produktivitas usaha lokal, menyediakan berbagai fasilitas pendukung perekonomian desa, memperkuat kelembagaan terkait, memperlancar rantai produksi dan pemasaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai landasan pertumbuhan ekonomi desa. Kontribusi ekonomi desa yang kuat memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi suatu kabupaten, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif di semua tingkat pembangunan, dengan kebijakan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah sendiri telah lama melaksanakan berbagai program untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.

Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf hidup guna mencapai kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat desa. “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha komersial yang dikelola bersama oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk mendorong perekonomian desa” (Rian Bastian, 2021: 1).

Pemerintah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang secara langsung

mengatur aspek-aspek detail terkait BUMDes. Melalui regulasi ini, diharapkan tercipta dorongan yang efektif untuk menggerakkan perekonomian desa melalui penciptaan suatu badan usaha yang sepenuhnya dikelola oleh warga desa. Salah satu inisiatif yang paling menonjol untuk memaksimalkan kemandirian ekonomi di tingkat desa adalah BUMDes.

BUMDes hadir sebagai solusi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan mengoptimalkan kebutuhan dan potensi lokal. Dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, BUMDes berprinsip "dari desa, oleh desa, dan untuk desa." Operasionalnya mengorganisir kegiatan ekonomi masyarakat ke dalam suatu badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berlandaskan pada potensi khas desa. Tujuan utama pendekatan ini adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha masyarakat. Ke depan, BUMDes diharapkan menjadi salah satu pilar kemandirian nasional sekaligus wadah pengembangan ekonomi berbasis karakteristik desa untuk Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mendukung pengembangan BUMDes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Baru memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas optimal dalam mengelola keuangan publik. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mencerminkan sejauh mana mereka mematuhi aturan-aturan yang telah

ditetapkan. Analisis tentang efisiensi dan efektivitas ini juga mencerminkan sejauh mana inovasi diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik (Erwin, 2018).

Salah satu cara untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dalam pengelolaan keuangan adalah dengan menerapkan konsep Value For Money. Konsep ini penting karena menjadi dasar dalam menilai kinerja sektor publik dengan fokus pada efisiensi, ekonomis, dan efektivitas. Elemen efisiensi dan efektivitas harus diterapkan secara bersamaan, karena ada kemungkinan suatu program berjalan secara sederhana dan efisien, tetapi hasil yang dihasilkan tidak sesuai dengan target. Sebaliknya, program dapat dinyatakan efektif dan tepat sasaran, tetapi dicapai dengan cara yang kurang ekonomis dan efisien (Sholikhah, 2022).

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena Desa Lobuk memiliki potensi pendapatan yang signifikan dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi, dan penguatan promosi. Pengelolaan BUMDes yang tepat dan efektif dapat memberikan manfaat berupa peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan ini memungkinkan desa untuk lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah tingkat atas. Selain itu, BUMDes bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa serta memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Pada tahun 2022, Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 330 desa sudah terbentuk sebanyak 310 BUMDes. Dari jumlah tersebut, yang sudah masuk pusat

data sebanyak 293 BUMDes, terbagi atas 29 BUMDes maju, 134 BUMDes berkembang, dan 130 BUMDes rintisan. Salah satu BUMDes yang sudah maju di Kabupaten Sumenep adalah BUMDes Pelangi Nusantara yang didirikan pada bulan November 2017 dan berada di Desa Lobuk Kecamatan Bluto. Desa Lobuk merupakan salah satu desa mandiri yaitu desa yaitu Desa yang bisa mengembangkan ekonominya sendiri tetapi masih mendapatkan sedikit bantuan dari pemerintah. Desa Lobuk juga termasuk Desa yang mengelola BUMDes secara baik. BUMDes di Desa Lobuk merupakan BUMDes yang mendapatkan penghargaan nomor 4 terbaik se Jawa Timur. BUMDes tersebut mengelola berbagai usaha di antaranya adalah produksi ikan teri krispi dan ikan co'o krispi, kios serta wisata.

Melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka secara sederhana penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada BUMDes Pelangi Nusantara Desa Lobuk”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan konteks diatas, peneliti dapat merangkum pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pelangi Nusantara Desa Lobuk?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pelangi Nusantara Desa Lobuk?

3. Bagaimana pengaruh tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pendapatan asli desa?

1.3 Batasan Masalah

Batasan pada penelitian ini yaitu perhitungan efektivitas dan efisiensi pada BUMDes Pelangi Nusantara Desa Lobuk terhadap pendapatan asli desa. Analisis perhitungan ini dibatasi pada periode tertentu untuk menjaga konsistensi dan akurasi data. Fokus penelitian dibatasi pada BUMDes Pelangi Nusantara yang berada di Desa Lobuk.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes Pelangi Nusantara Desa Lobuk Kecamatan Bluto. Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada BUMDes Pelangi Nusantara Desa Lobuk.
2. Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada BUMDes Pelangi Nusantara Desa Lobuk.
3. Menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pendapatan asli desa pada BUMDes Pelangi Nusantara Desa Lobuk.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk menambah wawasan dan mengetahui lebih dalam mengenai perhitungan efektivitas dan efisiensi pada BUMDes Pelangi Nusantara Desa Lobuk.

b. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan atau pendampingan kepada BUMDes terkait perhitungan efektivitas dan efisiensi yang mempengaruhi pendapatan asli desa.

c. Bagi Pengelola BUMDes

Memberikan informasi mengenai seberapa efektif dan efisien BUMDes Pelangi Nusantara Desa Lobuk dalam mengelola usaha desa sehingga ini berpengaruh terhadap pendapatan asli desa yang juga mempengaruhi kemakmuran masyarakat desa itu sendiri.